

Dilaporkan Balik, Roy Suryo: Harusnya Menag Sendiri yang Laporkan Saya

JAKARTA (IM) - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilapor balik oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat GP Ansor ke Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1012/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 25 Februari 2022.

Roy Suryo mengaku siap menghadapi apa yang sedang dihadapinya.

"Insha Allah saya siap dalam semua hal," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (27/2).

Roy menilai, laporan yang dilayangkan oleh LBH Pimpinan Pusat GP Ansor tidak memiliki dasar hukum dan "prematur". Sebab, menurutnya, pencemaran nama baik harus dilaporkan oleh yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini, Yaqut sendiri yang harus membuat laporan kepolisan.

"Pelaporan ke saya tersebut sebenarnya sangat prematur dan tidak ada legal standing-nya," tuturnya.

"Karena pencemaran nama baik, sesuai SKB 3 Menteri dan skop Kapolri, harus yang bersangkutan sendiri (Menag) yang lapor. Bukan mengatasnamakan Masyarakat Indonesia," ujarnya.

Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum

Pimpinan Pusat Ansor Dendy Zuhairil Finsa sebelumnya mengungkapkan alasan pihaknya melaporkan balik Roy Suryo.

"Kami duga Roy Suryo melanggar beberapa Undang-Undang ITE, KUHP, fitnah, perbuatan yang tidak menyangkan dan Undang-Undang keonaran," kata Dendy, Jumat (25/2).

Dendy menjelaskan, salah satu poin laporannya adalah unggahan Roy dalam akun Twitter-nya yang berisi potongan video pernyataan Yaqut.

"Soal konten video yang di dalam tweet dia itu yang memotong video aslinya dari media televisi yang dia potong hanya sepinggal saja. Itu kan dugaan kuat membawakan orang saling ribut, saling bermusuhan antar individu dan kelompok," ujarnya.

Dendy juga mempertanyakan soal unggahan Roy dalam akun media sosialnya yang mencantumkan tulisan asli dalam potongan video tersebut, meski Roy tidak berada di Pekanbaru, Riau, yang merupakan lokasi direkamnya video tersebut.

Adapun laporan yang dilayangkan GP Ansor bermula saat Roy melaporkan Yaqut Cholik Qoumas atas dugaan kasus penistaan agama karena membandingkan suara toa masjid dengan gonggong anjing.

Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo terhadap Yaqut Cholil Qoumas. **han**

2 Polhukam

FOTO:ANT



KASUS COVID-19 MULAI TURUN

Pengemudi ojek online mengantar barang ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, di Jakarta, Senin (28/2). Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit per Sabtu (26/2) turun menjadi 36 persen dari hari sebelumnya Jumat (25/2) 37 persen. Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian turun menjadi 46.643 per hari, dari sebelumnya pada Jumat (25/2) tercatat di 49.477 per hari.

KPU Tegaskan Tak Ada Alasan untuk Menunda Pemilu 2024

KPU mendorong Peraturan KPU (PKPU) yang akan dijadikan pedoman untuk seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dapat segera disahkan pemerintah dan DPR.

JAKARTA (IM) - Isu penundanaan Pemilu 2024 mencuat. Namun, bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga yang tidak memiliki alasan menunda pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

"Bagi KPU, tidak ada alasan untuk menunda Pemilu," kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid di Jakarta, Senin (28/2).

Pramono menjelaskan, lembaga penyelenggara pesta demokrasi di Indonesia tersebut memastikan akan berpegang pada keputusan politik bersama yang sudah diambil antara KPU, Pemerintah dan DPR.

Di mana, Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Karena itu, Pramono menyebut, munculnya wacana penundanaan Pemilu hanya sebatas wacana politik.

"Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan," ujar Pramono.

Terkait munculnya wacana penundanaan Pemilu 2024, Pramono menyatakan, isu itu akan berdampak pada jadwal Pemilu jika ditindaklanjuti dengan usulan fraksi-fraksi di Komisi II DPR, untuk mengubah keputusan bersama yang sudah diambil.

"Sepanjang tidak ada usulan baru, maka keputusan bersama itu akan terus berlaku," ucap Pramono.

Di sisi lain, Pramono menegaskan, penundanaan Pemilu hanya mungkin dilakukan jika

didahului dengan Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 22E Ayat (1).

"Sementara pengambilan keputusan dalam proses Amandemen juga tidak mudah. Karena itu, jika tidak ada Amandemen, maka penundanaan Pemilu merupakan tindakan inkonstitusional," ujar Pramono.

Secepatnya Sahkan PKPU

KPU mendorong Peraturan KPU (PKPU) yang akan dijadikan pedoman untuk seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dapat segera disahkan pemerintah dan DPR.

Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan hal itu merupakan salah satu hasil dari Rapat Pimpinan (Rapim) KPU di Surabaya yang digelar pada 23-26 Februari 2022.

"Dengan harapan PKPU tersebut tersedia lebih awal menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," kata Hasyim, Senin (28/2).

Menurut Hasyim, percepatan pengesahan PKPU

tersebut lantaran adanya tahapan atau proses menuju pesta demokrasi 2024 yang akan dimulai pada 2022. Rangkaian yang akan segera dilaksanakan pada 2021 ini adalah soal PKPU tahapan dan PKPU pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu.

"Terutama draf PKPU angka 1 dan 2 menjadi prioritas utama untuk segera diajukan dalam RDP dengan DPR dan Pemerintah. Rencananya akan dimulai pada 2022 ini," ujar Hasyim.

Dari Rapim itu, ia menyebutkan, terdapat delapan PKPU yang dibahas untuk dijadikan ketentuan tahapan dari Pemilu Serentak tahun

2024. Adapun delapan PKPU tersebut antara lain;

1. PKPU Tahapan;
2. PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu;
3. PKPU Pembentukan Dapil;
4. PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
5. PKPU Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
6. PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Penyelenggaraan Pemungutan Suara;
7. PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu; dan
8. PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. **han**

Survei: Anies Menang Lawan Prabowo jika Tak Ada Ganjar

JAKARTA (IM) - Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gubernur Anies Baswedan punya kans besar menang di Pilpres 2024 dengan asumsi yang bertarung hanya Anies dengan Menhan Prabowo Subianto.

Prediksi ini diungkapkan oleh para peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam hasil survei bertajuk "Kecenderungan Pilihan Presiden Kelompok Pemilih Kritis" yang mereka umumkan pada Senin (28/2).

Dalam survei ini, SMRC mengadakan beberapa jenis pertanyaan kepada responden, mengenai siapa pilihan presiden jika pemilu diadakan saat ini.

Pertanyaan pertama bersifat terbuka. Pertanyaan kedua bersifat semi terbuka. Pertanyaan ketiga bersifat tertutup dengan 15 nama. Dan pertanyaan terakhir, bersifat tertutup 3 nama antara Ganjar, Prabowo, dan Anies sebagai politikus dengan elektabilitas paling tinggi saat ini.

"Pada survei terakhir 8-10 Februari 2022, kita bertanya pilihan warga pemilih kritis, jika yang maju hanya Anies melawan Prabowo. Kalau 2 nama ini, artinya Ganjar tidak ikut bersaing, maka Anies Bas-

wedan mendapat 37,5 persen dan Prabowo 31,8 persen. Selisihnya jadi signifikan," ungkap peneliti Deni Irvani melalui kanal YouTube resmi SMRC, Senin (18/2).

Jika Ganjar masuk dalam kontestasi, elektabilitas Anies dan Prabowo masih cukup bersaing. Ganjar mendapatkan 34,7 persen, Anies 23,3 persen, Prabowo 21,9 persen dan tidak menjawab/tidak tahu 20,1 persen.

Sebelumnya, Survei SMRC pada Desember 2021 terhadap 3 nama, menempatkan Prabowo unggul sekitar 5 persen dari Anies meski masih di bawah Ganjar, tetapi 2 bulan berselang elektabilitas Anies telah mencapai 23,3 persen, sedangkan Prabowo 21,9 persen. Melihat tren ini, Anies diprediksi akan semakin kuat elektabilitasnya di kalangan pemilih kritis.

Berdasarkan survei SMRC tadi, Ganjar jadi sosok paling kuat dalam hal elektabilitas jelang 2024 di kalangan pemilih kritis. Namun, peluang Ganjar dicalonkan dalam Pilpres 2024 masih abu-abu, mengingat posisinya yang bukan termasuk elite di PDI-P.

Tanpa Ganjar, Prabowo menjadi politikus partai politik dengan elektabilitas paling tinggi sekitar 13 persen. **han**



FOTO:ANT

DEKLARASI DUKUNGAN TERHADAP PERATURAN PENERAS SUARA MASJID

Sejumlah warga Nahdliyin membacakan deklarasi mendukung Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, usai memperingati Isra Miraj di Desa Mulyasari, Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (28/2).

Semasa Hidupnya, Arifin Panigoro Pernah Terima Penghargaan Bintang Mahaputra

JAKARTA (IM) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang juga pengusaha Arifin Panigoro meninggal dunia pada Senin (28/2) di Amerika Serikat.

Arifin tutup usia saat menjalani perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat karena sakit kanker paru-paru.

Pendiri Medco Group pernah menerima sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Bintang Mahaputra. Penghargaan itu diterima Arifin Panigoro dari pemerintah.

"Arifin Panigoro, pendiri Medco Group, menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia (RI). Pemberian penghargaan ini berkat jasanya pada negara, dalam penyediaan kebutuhan energi untuk ketahanan energi nasional," dikutip dari akun Instagram medcofoundation, Senin (28/2).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Agustus 2019.

Arifin merupakan pelopor bisnis minyak dan gas bumi (migas) di kalangan pengusaha pribumi.

Pada saat bisnis migas masih didominasi perusahaan multinasional, dia berani terjun ke bisnis migas di awal 1990-an.

Berkat keberanian dan sikap nasionalisme, Arifin mampu membesarkan bisnisnya dengan mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan-perusahaan asing di Indonesia seperti Tesoro (1992), Stanvac

(1995), Novus Petroleum Ltd (2004), Blok B Natuna ConocoPhillips, tambang mineral Arifin Panigoro meninggal dunia pada Senin (28/2) di Amerika Serikat.

Selain itu, perusahaan yang didirikannya mengelola lapangan migas di berbagai belahan dunia, seperti Oman, Libia, Yaman, Tanzania, Thailand, Vietnam, dan Meksiko.

Per 2019 lalu, bisnis utama Arifin di bidang migas berkontribusi sekitar 100 ribu barrel oil equivalent per day (boepd).

Selama 18 tahun terakhir, Perusahaan telah berkontribusi 13,6 milyar dolar AS kepada negara, pembayaran pajak senilai lebih dari 2 milyar dolar AS serta menyediakan puluhan ribu lapangan kerja.

Pemilik PT Medco Energi Internasional Tbk, Arifin Panigoro, meninggal dunia pada Senin (28/2) sekitar pukul 03.29 WIB. Ia sempat menjalani perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat (AS).

Arifin Panigoro yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu sempat menjalani perawatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Anggota Wantimpres Lucky Djani membenarkan kabar berpulangnya pengusaha Arifin Panigoro.

"Iya benar," ujarnya. Jenazah akan dibawa di rumah duka, Jalan Jenggala I, Jakarta. Sejuah ini belum diketahui penyebab meninggalnya Arifin Panigoro. **han**

Tahap 2 Kasus Nurhayati Didorong Dipercepat Agar Segera Disetop

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kasus Nurhayati yang jadi tersangka usai melaporkan dugaan korupsi APBDES Rp 800 juta di Jawa Barat (Jabar) bakal disetop. Sementara pakar hukum pidana Prof Hibnu Nugroho menjelaskan cara yang paling tepat untuk menghentikan kasus Nurhayati.

Hibnu menjelaskan apabila berkas perkara Nurhayati sudah P21 atau lengkap, maka barang bukti beserta tersangkanya harus diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Dengan demikian, kasus bisa benar-benar ditutup.

"Kan berkas sudah diserahkan. Segera barang bukti dan orangnya diserahkan. Itu formulasi yang tepat. Artinya segera diselesaikan," ujar Hibnu saat dihubungi, Minggu

(27/2).

Sebab itu, Hibnu mendorong pihak kepolisian untuk segera menyerahkan Nurhayati ke jaksa. Dia menegaskan langkah itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan supaya permasalahan selesai.

"Sebagai asas cepat, segera saja dilimpahkan untuk segera dihentikan. Artinya segera saja ini kasus yang ada di penyidik, penyidik segera limpahkan tahap 2 ke penuntut umum. Selesai permasalahan itu," tuturnya.

Penyerahan Nurhayati ke jaksa sebagai langkah yang paling tepat dalam koridor hukum acara yang berlaku saat ini. Menurutnya, langkah itu elegan untuk dilakukan.

"Dalam koridor hukum acara, dalam melakukan penyidikan oleh polisi, segera di-

limpahkan ke penuntut umum. Dan nanti penuntut umum yang nanti akan menyelesaikan, menghentikan suatu perkara ini. Itu lebih tepat dalam koridor hukum acara yang berlaku sekarang, elegan lah gitu," kata Hibnu.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut kasus tersebut tidak cukup bukti untuk dibawa ke 'meja hijau'. Tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka kasus Nurhayati pun ditunda. Namun kasusnya secara resmi disetop.

"Belum di-SP3. Hasil gelarnya menyatakan perbuatan Nurhayati tidak cukup bukti, karena dia ranahnya masih ranah administratif. Keputusannya menunda tahap kedua tidak ada batas waktu penundanaan," ucap Agus. **mei**

FOTO:ANT



KARANTINA PENUMPANG INTERNASIONAL DIPERSINGKAT

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan keluar setibanya di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (28/2). Pemerintah akan memberlakukan kebijakan karantina selama tiga hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster mulai 1 Maret mendatang.

Anak Tutut Soeharto Lebih Pilih Nyaleg dari Partai Golkar Dibanding Berkarya

JAKARTA (IM) - Danty Indriastuti Purnamasari Rukmana, putri Tutut Soeharto, berniat mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada pemilu 2024. Namun, Danty mengaku lebih memilih partai Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politiknya dibandingkan Partai Berkarya besutan pamannya, Tommy Soeharto.

Padahal seluruh keluarga Cendana, termasuk ibu Danty, Tutut Soeharto, memilih partai Berkarya.

"Iya, betul (Golkar). Setiap manusia itu mempunyai hak masing-masing dan keluarga saya juga keluarga demokratis. Mau dari (partai) mana aja kan sama," kata Danty Indriastuti kepada wartawan, saat ditemui di Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (28/2)..

Dia menjelaskan bahwa

sikapnya memilih Golkar telah diketahui juga oleh pamannya, Tommy Soeharto. Danty mengaku mendapat dukungan penuh dari seluruh keluarga besar cendana.

"Kalau sowan, alhamdulillah sudah. Yang penting orang tua saya, suami saya, dan anak-anak saya kan mereka semua support 100% sama saya," lanjutnya.

Danty juga menyampaikan niat nyaleg tersebut di depan para warga Klender, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Dia berencana mewakili daerah tersebut.

"Saya berniat, insyaallah dengan seizin Allah juga dan dengan doa restu dan support Bapak-bapak, Ibu-ibu saya berencana untuk menjadi dari perwakilan Bapak/Ibu semua di legislatif tahun 2024," ucap Danty. **mei**